

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara berkembang dengan memiliki 17.504 pulau di dalamnya dan memiliki jumlah penduduk yang tidak sedikit. Seperti yang sudah diketahui Indonesia adalah Negara dengan penduduk terpadat nomor empat di dunia, Hal tersebut dapat dicerminkan dari adanya peningkatan kepadatan penduduk disetiap tahunnya (Watik et al., 2022). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada periode tahun 2020, jumlah penduduk negara Indonesia terdata sebanyak 270,203,9 jiwa, lalu pada periode tahun 2021 mengalami peningkatan yakni menjadi sebanyak 272,682,5 jiwa, dan pada pertengahan tahun 2022 jumlah penduduk di Indonesia menjadi 275,773,8 jiwa. Adanya peningkatan jumlah kepadatan penduduk di setiap tahun ini tentunya menjadikan sumber daya manusia di negara Indonesia juga semakin meningkat atau bertambah (BPS Republik Indonesia, 2023).

Pada dasarnya, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu kunci utama dalam adanya pembangunan nasional maupun pembangunan ekonomi disuatu wilayah atau Negara. Oleh sebab itu, diperlukan pengelolaan sumber daya manusia disuatu wilayah dengan sebaik-baiknya agar dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkompeten dan berkualitas (Ifadia et al., 2023). Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Todaro dan Smith bahwa terdapat tiga komponen pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi maupun nasional, yakni: (a) akumulasi modal; (b) pertumbuhan jumlah penduduk yang nantinya dapat menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja; (c)

kemajuan atau perkembangan teknologi (Mahmut et al., 2022). Dengan pendapat yang sudah dikemukakan diatas, dapat diketahui bahwa pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor dalam adanya pertumbuhan ekonomi.

Besarnya jumlah sumber daya manusia dapat dikatakan sebagai kunci modal suatu daerah dalam proses pembangunan. Adanya sumber daya manusia juga dapat dikatakan sebagai suatu subyek maupun obyek yang penting bagi adanya kelangsungan pembangunan. Disamping itu besarnya jumlah sumber daya manusia juga dapat membebani dalam adanya suatu pembangunan dan dapat menimbulkan masalah yang berkaitan dengan berbagai aspek-didalamnya. Tingginya laju pertumbuhan tersebut menyebabkan adanya ledakan jumlah penduduk yang cukup besar. Hal itu akan membuat adanya pertumbuhan dan penambahan tenaga kerja yang terus menerus, dan mengakibatkan adanya kesempatan kerja relatif terbatas sehingga dapat menciptakan fenomena atau masalah baru seperti pengangguran (Pratama, 2022).

Dalam pembangunan ekonomi, masalah ketenagakerjaan seperti banyaknya kasus pengangguran merupakan masalah yang dapat dikatakan rumit. Hal ini dikarenakan tinggi atau tidaknya tingkat pengangguran disuatu wilayah dapat dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi diwilayah tersebut. Apabila terjadi kenaikan presentase dari pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah tertentu, maka akan memberikan dampak pada peningkatan tenaga kerja. Sedangkan jika tingkat pertumbuhan ekonominya turun, penyerapan tenaga kerja pada suatu wilayah juga akan menurun (Prawira, 2018). Adanya penyerapan tenaga kerja yang kurang optimal inilah yang menyebabkan munculnya masalah pengangguran. Mengutip dari Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran dapat didefinisikan sebagai

individu-individu yang tidak mempunyai pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka individu-individu yang tidak mempunyai pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka individu-individu yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan dikarenakan merasa tidak mungkin akan mendapatkan pekerjaan, serta mereka individu yang sudah memiliki pekerjaan namun belum memulai bekerja.

Dikutip dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

[https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view\\_data/0000/data/1177/sdgs\\_11/1](https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1177/sdgs_11/1)

diakses pada 27 Februari 2023 Pukul 13.58 WIB.

Adanya kasus pengangguran yang cukup tinggi memiliki dampak langsung maupun tak langsung terhadap adanya peningkatan kriminalitas, kemiskinan, serta persoalan-persoalan mengenai sosial politik. Kondisi dengan cukup tingginya kasus pengangguran dapat menurunkan tingkat kesejahteraan serta daya beli masyarakatnya. Maksudnya, semakin rendah angka pengangguran yang ada disuatu wilayah, maka kehidupan masyarakat disuatu wilayah tersebut juga akan semakin Makmur. Begitu juga sebaliknya, semakin banyak kasus pengangguran disuatu wilayah maka tingkat kesejahteraan disuatu wilayah tersebut juga akan semakin menurun (Hardini, 2017 ; Putri & Mubarak, 2019).

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (2023) mencatat bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Februari 2023 tercatat mengalami kenaikan menjadi 69,30 persen dibandingkan pada Februari 2022 yang tercatat sebesar 69,06. Adanya peningkatan ini menunjukkan bahwa potensi dari tenaga kerja di Indonesia siap berpartisipasi pada perekonomian di wilayah Indonesia itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud yang dicakup dalam berita sebagai berikut:

JAKARTA - Badan Pusat Statistik mencatat TPAK pada Februari 2023 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, ini menunjukkan potensi tenaga kerja kita yang siap berpartisipasi pada perekonomian kita.

Sumber: (<https://www.antaraneews.com/berita/3522840/bps-tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-februari-2023-lebih-baik>, diakses pada 20 Oktober 2023).

Namun, meskipun demikian jumlah kasus pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi. Hal ini sesuai dengan data *Trading Economy* yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara dengan Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi kedua di Asia Tenggara pada Februari tahun 2023 dengan jumlah 5,45 persen. Data tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



**Grafik 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka di Negara Asean (2023)**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Pada gambar diatas dapat dijelaskan bahwa Negara dengan Tingkat Pengangguran tertinggi se-Asean yakni Brunai Darussalam dengan jumlah 7,2 persen, lalu disusul oleh Indonesia dengan jumlah 5,45 persen, Timor Leste dengan 4,9 persen, dan Filipina dengan 4,5 persen. Dengan jumlah 5,45 persen dan termasuk kedalam peringkat kedua, tentunya pemerintah negara Indonesia harus tegas dalam mengambil langkah untuk mengatasi permasalahan pengangguran yang ada. Adanya permasalahan mengenai ketenagakerjaan seperti pengangguran dapat menyebabkan kerawanan sosial, kerawanan ekonomi, dan kerawanan

keamanan masyarakat di suatu wilayah. Dilihat secara sosial, tingginya angka pengangguran tidak hanya akan membebani pemerintah, namun juga akan menyebabkan timbulnya beban bagi masyarakatnya itu sendiri. Sedangkan dilihat secara ekonomi, tingginya angka pengangguran disuatu wilayah akan mengakibatkan hilangnya potensi dalam peningkatan masyarakat (Putri & Mubarak, 2019 ; (Hardini, 2017).

Menurut data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,42 juta orang penganggur pada periode Agustus 2022. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan pada periode Februari 2022 yang tercatat sebanyak 8,40 juta orang penganggur Data tersebut ditunjukkan pada gambar 1.1 dibawah ini.



**Gambar 1.1 Jumlah dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia**  
(Agustus 2017-Agustus 2022)

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (2022)

Pada gambar diatas menjelaskan bahwa tingkat pengangguran yang ada di Indonesia cenderung berjalan fluktuatif per periodenya. Jika dilihat pada periode 2021, jumlah pengangguran yang ada di Indonesia mengalami penurunan yakni ada

sebanyak 9,1 juta jumlah orang yang menganggur pada Agustus 2021. Apabila dibandingkan dengan total angkatan kerja dengan jumlah sebanyak 143,72 juta orang, dapat diketahui bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia menurun sebesar 5,86 persen pada periode Agustus 2022 dibandingkan pada periode 2021 yakni sebesar 6,49 persen. Berdasarkan jenis kelaminnya, TPT pada laki-laki diketahui berjumlah sebesar 5,93 persen, sementara TPT perempuannya sebesar 5,75%. Melihat adanya penurunan angka pengangguran tentunya diharapkan sejalan dengan makin membaiknya juga pemulihan perekonomian di Indonesia.

Pada publikasi terbarunya, Badan Pusat Statistik (2023) menyatakan bahwa pada periode awal tahun 2023 tepatnya pada Februari 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia pada periode Februari 2023 mengalami penurunan menjadi 5,68 persen dengan jumlah 7,99 Juta orang menganggur. Meski jumlahnya masih terbilang tidak sedikit, namun angka tersebut lebih baik dibandingkan dengan periode Tahun 2022 yang mencapai 8,42 juta. Dikutip dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/05/05/2001/februari-2023--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-45-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-2-94-juta-rupiah-per-bulan.html> diakses pada 20 Oktober 2023 pukul 12.47 WIB.

Undang-Undang Dasar Pasal 27 Ayat 2 tahun 1945 secara tidak langsung memiliki makna tersendiri jika ditinjau dari segi kemanusiaannya, bahwa keseluruhan warga negara Indonesia seharusnya mempunyai hak atas mendapatkan pekerjaan serta penghidupan yang memadai atau layak. Dari hal tersebut tentunya menunjukkan bahwa kewajiban yang harus dilakukan pemerintah adalah

mempersiapkan lapangan kerja yang cukup dan produktif secara konstitusional untuk masyarakatnya. Meningkatnya angkatan kerja yang ada di Indonesia jika tanpa disertai dengan banyaknya jumlah lapangan kerja bukan satu-satunya faktor yang menimbulkan permasalahan pengangguran di Indonesia. Adapun beberapa hal-hal yang menjadi penyebab dari adanya masalah pengangguran mengutip dari Yuniarti & Imaningsih (2022) yakni, (i) keahlian atau keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia atau pencari kerja tidak memenuhi permintaan pasar; (ii) besaran dari lapangan kerja yang ada tidak berbanding lurus dengan besarnya pertumbuhan angkatan kerja; (iii) kemajuan teknologi yang menyebabkan tergantinya sumber daya manusia oleh teknologi canggih seperti robot; (iv) terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), serta pada beberapa tahun terakhir dapat diketahui bahwa adanya Pandemi Covid menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam peningkatan pengangguran disetiap Negara, khususnya Indonesia.

Persoalan mengenai pengangguran terjadi tidak dalam lingkup nasional saja, akan tetapi juga hampir terjadi disetiap provinsi, tidak terkecuali di seluruh Provinsi yang terdapat di Pulau Jawa. Berdasarkan hasil sensus pada tahun 2000 jumlah penduduk pulau Jawa yakni berjumlah 121,352,608 jiwa atau dengan kata lain sekitar 58,83% dari jumlah besarnya penduduk yang ada di Indonesia yakni sebesar 206,264,595 jiwa. Adanya hal itu membuat Pulau Jawa dapat dikatakan sebagai pasar industri di Indonesia serta tidak sedikit industri-industri yang memilih Pulau Jawa sebagai tempat untuk berkonsentrasi di bidang perindustrian sehingga menjadikan Pulau Jawa berperan penting bagi adanya perekonomian nasional. Oleh karena itu juga, membuat semakin bertambahnya jumlah angkatan kerja yang ada

di Pulau Jawa yang sangat pesat sehingga membuat berbagai lapangan pekerjaan kesulitan untuk menampung angkatan kerja secara optimal akibat dari ketidakseimbangan antara jumlah dari tersedianya lapangan pekerjaan dengan besarnya angkatan kerja sehingga pengangguran yang ada di Pulau Jawa juga semakin bertambah. Adapun data mengenai pengangguran yang ada di Pulau Jawa yakni ada pada tabel 1.1 di bawah ini.

**Tabel 1.1 Jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka se-Pulau Jawa (Agustus 2021-Agustus 2022)**

PROVINSI	TPT 2021 Agustus (%)	TPT 2022 Agustus (%)
Jawa Barat	9,82	8,31
Banten	8,98	8,09
DKI Jakarta	8,50	7,18
Jawa Tengah	5,95	5,57
Jawa Timur	5,74	5,49

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia 2022

Tabel yang ada diatas menjelaskan mengenai jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diseluruh pulau jawa pada periode Agustus 2021-Agustus 2022 yang sudah menurun yang berarti bahwa wilayah-wilayah yang ada di Pulau Jawa dapat menekan angka pengangguran pada saat keadaan Pandemi Covid. Jawa Barat menduduki posisi Tingkat Pengangguran Tertinggi se-Pulau Jawa dengan 8,31% selama dua tahun berturut-turut meskipun mengalami penurunan sebesar 1,51%, lalu disusul oleh Banten dengan 8,09% pada periode Agustus 2022, DKI Jakarta dengan 7,18%, Jawa Tengah 5,57%, dan yang memiliki TPT terendah se-Pulau Jawa yakni Jawa Timur dengan 5,49%. Meskipun dari setiap provinsi yang ada mengalami penurunan pada setiap periodenya, namun Tingkat Pengangguran Terbuka tersebut masih membutuhkan penanganan serius dari pemerintah terkait.



Berdasarkan tabel yang sudah dijelaskan diatas, dapat dilihat juga bahwa dengan tingkat pengangguran sebanyak 5,49% Provinsi Jawa Timur termasuk kedalam Tingkat Pengangguran terkecil se-Pulau Jawa yang tentunya tak lepas dari peran dan tugas pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dapat menekan angka pengangguran dengan maksimal. Seperti yang sudah diketahui bahwa Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang wilayahnya menjadi pintu gerbang aktivitas ekonomi masyarakat sehingga provinsi ini menjadi pusat kegiatan perekonomian. Adanya kegiatan perekonomian di provinsi Jawa Timur ini menyumbang kurang lebih 15% produk domestik bruto nasional. Namun, walaupun Provinsi Jawa Timur termasuk dalam wilayah yang memiliki jumlah tingkat pengangguran terendah se-Pulau Jawa yang dibandingkan dengan Jawa Barat dan Jawa Tengah, tingkat pengangguran di Jawa Timur ini masih dikatakan tinggi dan masih membutuhkan peran pemerintah terkait dalam menekan jumlah angka pengangguran karena penurunan jumlah pengangguran yang ada di Jawa Timur dikatakan belum cukup optimal (Pratama, 2022).

Secara administratif, Jawa Timur ini mempunyai 9 Kota dan 29 Kabupaten dengan besaran jumlah penduduk pada tahun 2021 sekitar 40,666 jiwa dengan kepadatan penduduk per km<sup>2</sup> sebesar 855 jiwa/ km<sup>2</sup>. Keadaan tersebut tentunya sangat berpengaruh pada lahirnya jumlah angkatan kerja yang cukup banyak yakni sebesar 22,87 juta orang pada periode 2022. Banyaknya jumlah angkatan kerja di Jawa Timur yang tidak berbanding lurus dengan tersedianya lapangan pekerjaan tentunya mengakibatkan adanya fenomena pengangguran berbagai wilayahnya (Mariono et al., 2017). Berikut dibawah ini adalah lima wilayah penyumbang

Tingkat Pengangguran Terbuka terbanyak di Provinsi Jawa Timur yakni dapat dilihat dibawah ini.

**Tabel 1.2 Jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2022**

Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Timur (Persen)		
	2020	2021	2022
Kabupaten Sidoarjo	10,97	10,87	8,80
Kota Batu	5,93	6,57	8,43
Kabupaten Bangkalan	8,77	8,07	8,05
Kabupaten Gresik	8,21	8,00	7,84
Kota Malang	9,61	9,65	7,66

Sumber: Badan Pusat Statistik 2023

Gambar yang ada diatas menjelaskan bahwa ada di Jawa Timur memiliki beberapa wilayah penyumbang kasus pengangguran terbanyak pada periode tahun 2022, yakni Kabupaten Sidoarjo dengan jumlah sebanyak 8,80 persen, Kota Batu sebanyak 8,43 persen, Kabupaten Bangkalan sebanyak 8,05 persen, Kabupaten Gresik sebanyak 7,84 persen, dan Kota Malang sebanyak 7,66 persen. Pada gambar yang ada diatas juga dapat diketahui bahwa Kabupaten Sidoarjo merupakan wilayah penyumbang tertinggi selama tiga periode berturut-turut dengan jumlah sebesar 8,80% pada periode 2022, meskipun terjadi penurunan dari periode tahun sebelumnya, Tingkat Pengangguran Terbuka yang ada di Kabupaten Sidoarjo masih dikatakan cukup tinggi.

Sebagai wilayah yang termasuk dalam Kawasan Gerbangkertosusila dan memiliki lokasi yang berdekatan dengan Kotamadya Surabaya, Kabupaten Sidoarjo ini dapat dikatakan sebagai salah satu Kabupaten yang menjadi penyangga utama ibukota Jawa Timur yaitu Kota Surabaya. Selain itu, Kabupaten Sidoarjo juga dapat dijadikan sebagai penopang pembangunan serta pengembangan wilayah Ibu Kota Jawa Timur yang menjadikan Kabupaten Sidoarjo dikatakan sebagai wilayah yang

cukup potensial untuk dikembangkan lebih lagi yang dapat didukung oleh keberadaan potensi daerah yang dapat mendukung kinerja dalam bidang pembangunan, khususnya pembangunan perekonomian (Hardini, 2017). Dengan ini, masalah pengangguran yang ada di Kabupaten Sidoarjo tentunya menjadi masalah yang serius untuk diatasi karena adanya tingkat pengangguran yang tinggi membuat kemakmuran masyarakatnya semakin berkurang, sebab adanya pengangguran yang tinggi dapat meningkatkan peluang masyarakat itu sendiri terjebak dalam kemiskinan akibat kurangnya pendapatan maupun tidak memiliki pendapatan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sidoarjo tentunya disebabkan oleh beberapa faktor, yakni (a) keahlian dan kapasitas para pencari kerja yang kurang sesuai dengan permintaan pasar; (b) besaran jumlah lapangan kerja yang tidak berbanding lurus dengan jumlah pertumbuhan angkatan kerja; (c) adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan (Novitasari & Hertati, 2022), hal tersebut berdampak pada berbagai aspek seperti pada kegiatan perekonomian masyarakat yang melingkupi aktivitas atau kegiatan serta dinamika ketenagakerjaan sehingga tidak sedikit perusahaan atau instansi yang mengalami gulung tikar dan tidak sedikit pula pekerja yang tertimpa kasus PHK. Faktpr yang paling berpengaruh terhadap adanya kasus pengangguran di Kabupaten Sidoarjo yakni terjadinya Pandemi Covid pada beberapa tahun terakhir. Hal tersebut sebanding dengan pernyataan dari Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo yang menyatakan dalam berita sebagai berikut:

SIDOARO – Angka pengangguran di Kabupaten Sidoarjo mencapai yang tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Hal ini dikarenakan banyaknya perusahaan yang gulung tikar dan pindah tempat produksi.

Sumber: (<https://www.suarajatimpost.com/news/angka-pengangguran-di-sidoarjotertinggi-di-jawa-timur/>, diakses pada 27 Februari 2023)

Tidak hanya itu, tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sidoarjo dalam perubahannya juga terdapat aspek-aspek yang memberikan pengaruh seperti pertumbuhan ekonomi, presentase kemiskinan, serta Indeks Pembangunan Manusia (Yuniarti & Imaningsih, 2022). Didasarkan pada data publikasi terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Perekonomian Kabupaten Sidoarjo tumbuh 4,21 persen pada tahun 2021. Hal tersebut tentunya mengalami kenaikan pada akhir tahun 2022. Bupati Kabupaten Sidoarjo yakni Ahmad Muhdlor yang menyatakan dalam wawancaranya bahwa menutup tahun atau akhir tahun 2022, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo ini mencapai 7,53 persen yang membuat Pertumbuhan Ekonomi di wilayah ini masuk kedalam pertumbuhan ekonomi tertinggi nomor 2 (dua) se-Jawa Timur. Dikutip dari berita <https://jatim.antaranews.com/berita/685497/pemkab-sidoarjo-meminta-perusahaan-alih-daya-jaga-harmonisasi-industri> diakses pada 27 Februari 2023 pukul 14.55 WIB. Presentase nilai Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sidoarjo sendiri pada tahun terakhir menunjukkan kategori sangat tinggi dengan jumlah 81,02 persen yang juga mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2021 yang nilainya sebesar 80,65 persen.

Seperti yang dapat diketahui bahwa terdapat beberapa indikator yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari adanya pembangunan ekonomi disuatu wilayah, salah satunya yakni tingkat penganggurannya. Berdasarkan adanya tingkat

pengangguran di suatu wilayah juga dapat dilihat kondisi suatu wilayah tersebut apakah perekonomiannya sudah berkembang secara cepat/lambat ataupun mengalami kemunduran. Dalam suatu proses pembangunan nasional, adanya pembangunan ekonomi seringkali menjadi fokus utama karena keberhasilannya dapat memperkuat perekonomian disuatu wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan ekonomi disuatu wilayah yang stabil dan kuat tentunya dapat berkontribusi secara signifikan pada kesuksesan pembangunan nasional tersebut.

Adanya kasus pengangguran yang tidak sedikit di Kabupaten Sidoarjo merupakan persoalan yang harus cepat diatasi oleh pemerintah terkait. Seperti yang sudah diketahui, peran dari Dinas Tenaga Kerja adalah suatu hal yang penting khususnya dalam persoalan-persoalan ketenagakerjaan demi tercapainya kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah terkait harus terus berupaya untuk meningkatkan lapangan pekerjaan diberbagai sektor dan harus menjalankan program pemerataan kesempatan kerja karena seluruh masyarakat memiliki kesempatan kerja yang sama serta diharapkan untuk dapat menempati kualifikasinya sesuai dengan kebutuhan disemua dan berbagai sektor yang ada.

Hal tersebut harus sepadan dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 mengenai Perluasan Kesempatan Kerja dalam mengatasi atau menekan jumlah pengangguran di Negara Indonesia. Selaku sektor pemerintah yang memiliki tanggung jawab yang besar dalam bidang ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo tentunya melakukan berbagai upaya dan program yang diharapkan dapat mengatasi kasus di wilayah terkait dan para angkatan kerja juga diharapkan mendapatkan pekerjaan yang layak

dan sesuai dengan kualifikasinya. Hal itu selaras dengan yang ada pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan juga Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dimana dijelaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo memiliki peran dan kewenangan dalam pembangunan daerah khususnya mengenai ketenagakerjaan untuk meningkatkan peluang kerja serta mengoptimalkan pemberdayaan angkatan kerja dengan baik.

Dalam menangani tingginya kasus pengangguran di Kabupaten Sidoarjo ini, pemerintah kabupaten Sidoarjo menegaskan bahwa pihak terkait memilih untuk mengerahkan strategi multidimensi, yang berarti bahwa persoalan pengangguran ini diatasi secara gotong royong dengan melibatkan berbagai Lembaga atau instansi bukan hanya ditangani sendiri oleh Dinas Tenaga Kerja namun dengan menggandeng pihak-pihak Dinas Koperasi dan UMKM, Badan Usaha Milik Negara dan sektor swasta. Walaupun demikian, Dinas Tenaga Kerja tetap memiliki porsi peran yang penting dalam hal itu. Untuk mengatasinya, Dinas Tenaga Kerja meluncurkan beberapa strategi seperti Program Pelatihan Berbasis Kompetensi, Program Bursa Kerja (*Job Fair*), *Job Matching*, Bursa Kerja Khusus (BKK) yang sedang marak digalakkan untuk para Sekolah Menengah Kejuruan, Sosialisasi Regulasi CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) sebagai peluang kerja ke Luar Negeri, dan tidak hanya itu Kepala Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo Ainun Amalia juga menambahkan untuk pihak terkait berupaya untuk mendorong masyarakat usia produktif menumbuhkan ekonomi kreatif dengan keterampilan memadai.

Berdasarkan data-data dan penjelasan yang sudah dijelaskan diatas, merupakan suatu hal yang menarik bagi peneliti untuk menggali lebih dalam

tentang peranan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dalam upaya menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Sidoarjo sebagai penyandang Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi selama tiga periode berturut-turut, dengan menitikberatkan pada Kapabilitas Organisasi yang menggunakan teori dari Kusumasari (2014) yang memiliki enam indikator meliputi, 1) Kelembagaan; 2) Implementasi Kebijakan; 3) Sumber Daya Manusia; 4) Sistem Keuangan; 5) Sumberdaya Teknis; 6) Kepemimpinan. Sebelumnya, penelitian mengenai Kapabilitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah dilakukan oleh Arbi (2018) di Kabupaten Bengkalis dengan judul Kapabilitas Pemerintah Daerah Dalam Merespon Dinamika Ketenagakerjaan.

Peneliti memilih topik ini karena penelitian mengenai Kapabilitas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo belum pernah diteliti sebelumnya, hal ini tentunya akan menjadi suatu *novelty* atau kebaruan penelitian. Maka dari itu, peneliti mengambil judul “**Kapabilitas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Dalam Mengatasi Masalah Ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang sudah dipaparkan oleh peneliti diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yakni “Bagaimana Kapabilitas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Dalam Mengatasi Masalah Ketenagakerjaan?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai kapabilitas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan yang ada diwilayah tersebut.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1. Bagi Mahasiswa**

- a) Dapat memperdalam pengetahuan dan wawasan mengenai peran atau kapabilitas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan diwilayah tersebut.
- b) Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan atau referensi bagi mahasiswa lainnya yang akan melakukan penelitian serupa serta juga diharapkan untuk mahasiswa lainnya dapat mengerti lebih lagi mengenai peran atau kapabilitas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan melalui penelitian ini.



## 2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Kajian ini diharapkan untuk menambah bahan pustaka atau literatur pada perpustakaan yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang akan dilakukan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur serta dapat digunakan sebagai penunjang Pendidikan dan bahan pembanding untuk peneliti lainnya yang melakukan penelitian serupa dimasa selanjutnya.

## 3. Bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo

Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan informasi pada Pimpinan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo terkait solusi dari permasalahan ketenagakerjaan khususnya pada persoalan tentang kasus pengangguran dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya dalam perbaikan pelaksanaan strategi yang ada.